

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek infrastruktur, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat. Ketiadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), terbatasnya armada pengangkut, serta kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan optimal.
2. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi meliputi:
 1. Penyusunan *Masterplan* atau Rencana Induk Persampahan.
 2. Perencanaan sistem pengangkutan *door to door*.
 3. Usulan peningkatan retribusi layanan sampah.
 4. Penambahan armada dan petugas operasional.
 5. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Namun, strategi tersebut sebagian besar masih dalam tahap perencanaan dan belum seluruhnya terealisasi di Kelurahan Bagan Pete.

3. Efektivitas strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Bagan Pete masih rendah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana di tingkat lokal, serta belum adanya sistem birokrasi dan penegakan hukum yang kuat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan Kesimpulan yang telah disampaikan maka peneliti memberikan masukan atau saran yang diharapkan kedepannya dapat membantu pengelolaan sampah di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi, yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi perlu mempercepat realisasi pembangunan TPS di wilayah Kelurahan Bagan Pete sebagai fasilitas dasar pengelolaan sampah.
2. Pemerintah perlu segera melegalkan dan mengimplementasikan Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Jambi, agar sistem seperti *door to door* dan skema retribusi baru dapat diterapkan secara terstruktur dan memiliki dasar hukum yang kuat.
3. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan, dan RT/RW perlu diperkuat melalui penyusunan SOP pengelolaan sampah berbasis wilayah, serta pembentukan unit pengawasan lingkungan di tingkat kelurahan.
4. Diperlukan edukasi lingkungan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan dan pembuangan sampah yang benar. Edukasi bisa

dilakukan melalui sekolah, pengajian, tokoh masyarakat, serta kampanye media sosial.

5. Partisipasi aktif masyarakat harus didorong melalui pemberdayaan bank sampah, insentif lingkungan, atau program gotong royong berbasis RT. Strategi pengelolaan sampah tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan.
6. Penelitian ini juga merekomendasikan agar pemerintah kota membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta atau LSM, baik dalam bentuk pengadaan fasilitas, inovasi teknologi pengolahan, maupun pemberdayaan ekonomi dari sampah (ekonomi sirkular).